BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang besar, negeri yang kaya. Kekayaan alam yang berlimpah, hutan yang lebat, laut yang luas, beraneka tanaman dan hewan, bahkan hewan langka yang telah dikaruniakan Tuhan kepada Bangsa Indonesia.¹

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”²

Pasal tersebut diatas jelas diterangkan bahwa segala kekayaan alam yang terkandung di Bumi Indonesia seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun seiring berjalannya waktu, banyak sekali pembangunan proyek oleh kalangan elit yang mana tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan akibat pembangunan proyek tersebut. Padahal dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

¹ Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Penerbit PT ALUMNI, Bandung, 2012, Hlm. 1

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan perdamaian abadi dan berkeadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa yang termaktub dalam alinea kedua.

Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan (*rain forest*) Kalimantan dan Papua. Hutan tropis di Indonesia menyimpan banyak potensi energi mikrobiologi yang sangat diperlukan dunia. Senior *Advisor for Terrestrial Policy, The Nature Conservancy*, Wahjudi Wardoyo mengatakan energi mikrobiologi sebagai generasi kedua dan ketiga sumber energi di dunia. Energi mikrobiologi hanya dapat ditemukan di hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati.³

Sumber daya hutan dan lahan merupakan satu kesatuan alam yang mempunyai saling ketergantungan (*interdependence*) yang sangat tinggi. Hutan sebagai suatu *biotic community* dan piramida kehidupan secara absolut membutuhkan *abiotic community* yakni lahan, sebagai habitatnya. Adapun lahan sangat rentan terhadap bahaya erosi tanpa piramida kehidupan hutan. Selanjutnya hutan dan lahan merupakan habitat bagi piramida kehidupan lain seperti fauna dan flora yang dalam banyak hal sangat menopang kehidupan manusia, baik dari segi makanan maupun dari segi obat-obatan.⁴

³ <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/12/bagaimana-hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia-di-masa-depan> diakses pada 20 Juni 2019

⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, Hlm. 81

Begitu pentingnya peranan hutan, namun betapa ironis dan memprihatinkan melihat laju kehilangan hutan di Indonesia yang begitu cepat. Kekayaan alam berupa hutan sebagaimana dijelaskan diatas, saat ini semakin terancam. Hal ini disebabkan oleh salah satu tindak kejahatan dibidang kehutanan yakni penebangan hutan secara liar (*illegal logging*).

Penebangan liar (*illegal logging*) ini telah menyebabkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (*ekologi*) serta fungsi sosial.

Penebangan liar (*illegal logging*) merupakan kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (*ekspor-impor*) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.⁵

⁵ Sukardi. (2005). *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana(Kasus Papua)*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Esensi yang penting dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka penebangan liar (*illegal logging*) berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Praktek *illegal logging* sudah barang tentu memiliki dampak negatif yang sangat besar. Secara kasat mata dampak negatif *illegal logging* dapat diketahui dari rusaknya ekosistem hutan. Rusaknya ekosistem hutan ini berdampak pada menurunnya atau bahkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan air, pengendali air yang dapat mencegah banjir juga tanah longsor. Sehingga rentan terhadap bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Disamping itu, *illegal logging* menghilangkan keanekaragaman hayati, berkurangnya kualitas dan kuantitas ekosistem dan *biodiversity*, dan bahkan *illegal logging* dapat berperan dalam kepunahan satwa alam hutan Indonesia.

Dari sisi ekonomis, *illegal logging* telah menyebabkan hilangnya devisa negara. Nilai kerugian negara akibat praktik pembalakan liar (*illegal logging*) ataupun pembabatan hutan secara legal namun penuh rekayasa suap dan korupsi, telah menyebabkan kerusakan luar biasa. Tak hanya kerusakan ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat,

praktik *illegal logging* dan "*legalized logging*" ini juga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Studi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) selama kurun waktu 2004-2010, kerugian negara akibat pembalakan hutan di Indonesia mencapai Rp 169,7 triliun. Nilai sebesar itu diperoleh dari perhitungan kekurangan penerimaan negara dari sektor pajak bumi dan bangunan serta sejumlah perijinan dan royalti.⁶

Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (*cukong*), penyedia angkutan dan kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).⁷

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang mana didalamnya terdapat aturan hukum/ kebijakan hukum atau dapat disebut dengan politik hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan/ pelanggaran hukum.

Sudarto mengatakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum pidana mengandung

⁶ <https://antikorupsi.org/id/news/menghitung-kerugian-negara-akibat-illegal-logging-0>
diakses tanggal 20 Juni 2019

⁷Utami, T. B. (2010). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal logging. *Journal Undip*, Universitas Diponegoro, hal.5

arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁸

Upaya mengatasi kasus *illegal logging* di Indonesia, jajaran aparat penegak hukum (penyidik POLRI maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, kejaksaan maupun hakim) telah menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

Banyaknya kasus di daerah-daerah di Indonesia dimana seseorang hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menebang beberapa batang pohon tanpa ijin dari pejabat yang berwenang kemudian dijatuhkan hukuman tindak pidana *illegal logging*. Seperti pada kasus nenek Asyani(67 tahun) terdakwa pencurian dua batang pohon jati milik perhutani untuk dijadikan tempat tidur. Nenek Asyani divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 500.000,- subsider 1 hari hukuman percobaan.

Berbanding terbalik dengan kasus tindak pidana *illegal logging* oleh terdakwa Gusti Syaifuddin, SH bin H. Gusti Amir dengan putusan

⁸Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Semarang: Kencana Prenada Media Group, hal.26

perkara Pengadilan Negeri Tarakan No.62/Pid.B/2007/PN. TRK. Kasus pembalakan liar yang melibatkan Mayjen TNI (purn) Gusti Syaifuddin. Mantan Sekjen Depnakertrans itu disangka telah melakukan penjarahan kayu di Kecamatan Segah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Gusti disangka melakukan penebangan di luar wilayah izin penebangan kayu yang dimilikinya sekitar 2.000 ha. PT Tunggal Buana Perkasa milik tersangka melalui dua kontraktornya, Arifin dan Darul Hakim, telah melakukan penebangan sejauh 14 km di luar wilayah tebangan sejak tahun 1999. Maret 2006, Tim Tastipikor dan tim khusus anti pembalakan liar Mabes Polri telah menyita 6.200 M3 kayu hasil tebangan liar PT Tunggal Buana Perkasa. Dari penjarahan kayu itu, negara dirugikan sekitar Rp 3,4 miliar. Terdakwa Gusti Syaifuddin, SH divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta tahun) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 tahun (dua) bulan.

Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan maka akan menimbulkan permasalahan baru yang berkaitan dengan tujuan penanggulangan kejahatan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, menjadikan pemikiran sudah adilkah mereka yang hanya karena ingin memenuhi kebutuhan ekonominya diancam dengan hukuman yang sama dengan para mandor serta pemilik modal yang secara jelas mencuri serta

menebang kayu dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Menjerat pelaku penebangan hutan secara liar(*illegal logging*) sama susahnya dengan menjerat para koruptor di Indonesia yang sudah banyak merajalela. Ada banyak kendala yang harus dihadapi seperti alasan bukti-bukti yang tidak cukup kuat, aturan hukum yang ternyata tidak bisa menjerat pelaku yang sesungguhnya serta tidak seriusnya para penegak hukum untuk menjerat pelaku penebangan hutan secara liar(*illegal logging*).

Pelaku yang tertangkap biasanya hanyalah para pekerja biasa yaitu para tukang penebang kayu, kuli-kuli pengangkut dan lain lainnya, serta para pekerja kasar yang pada umumnya mereka semua para pekerja diperintah oleh atasan/majikan untuk melakukan penebangan dan pengangkutan. Mereka umumnya hanya dikenai pidana penjara berkisar bulanan dengan hukuman denda yang tidak seberapa pula.

Upaya menangani perusakan hutan sebenarnya sudah lama dilakukan, namun belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena belum adanya perturan perundang-undangan yang secara tegas menerangkan mengenai kejahatan perusakan hutan secara terorganisir. Maka dari itu diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-undang untuk menjerat para pelaku perusakan hutan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku perusakan hutan.

Guna mengatasi semakin maraknya tindakan perusakan hutan dalam hal ini *illegal logging*, maka diperlukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif yakni bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal logging*, syarat apa saja yang harus terpenuhi untuk menjerat seseorang yang melakukan perbuatan/tindakan penebangan liar dan sanksi apa saja yang dijatuhkan kepada pelaku. Atas dasar inilah yang kemudian menjadikan pemerintah untuk membentuk Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai dasar utama pengaturan hukum dalam menanggulangi kasus *illegal logging* ini.

Sebelum menyusun skripsi ini, Penulis telah melakukan penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Pati yang dimulai pada tanggal 26 Juli 2019 sampai 05 Agustus 2019. Sebelumnya penulis telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Demak, namun ternyata objek penelitian yakni kasus *illegal logging* yang hendak penulis teliti merupakan kasus yang sudah lama terjadi yang mana kasus tersebut terjadi pada tahun 2010 sedangkan tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan penulis untuk senantiasa upgrade sesuai perkembangan zaman, sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian kembali di lain tempat. Penulis melakukan pencarian objek penelitian yakni kasus *illegal logging* melalui website resmi Direktorat Putusan Mahkamah Agung, setelah mencoba mencari kasus-kasus terbaru, akhirnya penulis menemukan objek penelitian yang mana kasusnya terjadi pada tahun 2017

dan terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pati, sehingga pada akhirnya Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri kelas IA Pati.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Pati”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pati?
2. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Pati dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana *illegal logging*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pati.

2. Untuk mengetahui apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana *illegal logging*.

D. Manfaat/ Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa hukum tentunya dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepastakaan.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* yang semakin marak ini dan juga sebagai sumbangan ilmu kepada masyarakat khususnya mahasiswa fakultas hukum serta bagi penulis sendiri adalah sebagai wahana untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat.

E. Terminologi

1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁹

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁰

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang menurut KUHP.¹¹

4. *Illegal Logging*

Illegal Logging adalah Pembalakan liar atau penebangan liar (bahasa Inggris: illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman

⁹ <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html> diakses pada tanggal 20 September 2019 jam 20.00 Wib

¹⁰ <http://prasko17.blogspot.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana.html> diakses pada hari Minggu, 31 Maret 2019 jam 20.48 WIB

¹¹ <https://www.suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html> diakses pada hari Minggu, 31 Maret 2019 jam 21.00 WIB

faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.¹²

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

F. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data-data suatu penelitian, diperlukan metode-metode yang tepat sehingga apa yang diinginkan untuk dapat dicapai dalam penelitian tersebut dapat mencapai hasil yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Untuk itu dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yakni di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara yang berkaitan dengan penerapan

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar diakses pada tanggal 20 september 2019 jam 20.00 wib

sanksi tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang selanjutnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri kelas IA Pati.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sebab penelitian dalam menganalisis berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan objek permasalahan yakni mengenai penerapan sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Kelas IA Pati.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder untuk bahan kelengkapan data sesuai dengan yang diharapkan.

a. Data Primer

Pengumpulan data yang diperoleh melalui hasil wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan Hakim di Pengadilan Negeri Pati Kelas IA yang pernah menangani kasus *illegal logging*.

b. Data Sekunder

Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) :

1.) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa Peraturan Perundang-undangan yakni :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berkaitan dengan tugas dan fungsi Hakim
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Percepatan Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

2.) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan kepustakaan yang berasal dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus *illegal logging*.

3.) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku literatur, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi yang berkaitan dengan kasus *illegal logging*.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melalui tanya jawab secara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri kelas IA Pati yang pernah menangani kasus *illegal logging*.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Pati yang beralamat di Jalan P. Sudirman, No.Km 3, Gebyaran, Dadirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa tengah. Sedangkan subyek penelitian adalah salah satu hakim yang pernah menangani perkara *illegal logging* di Pengadilan Negeri Kelas IA Pati.

6. Penyajian data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara kualitatif mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan

sanksi tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

7. Metode Analisis Data

Setelah data dari hasil terjun ke lapangan sudah terkumpul, selanjutnya data akan diolah dan dianalisis. Analisis data ini dimaksudkan untuk menyederhanakan data agar nantinya mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Deskriptif, yakni menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara jelas dan tepat untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.
- b. Kualitatif, yakni menganalisis data-data berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian apa yang diutarakan responden baik lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari dengan metode berpikir deduktif dan induktif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi 4 bab berikut masing-masing sub bab untuk memudahkan penulisannya. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum (skripsi) yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum pidana, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang *illegal logging*, tindak pidana *illegal logging* dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian yang disertai pembahasan mengenai bagaimana pengaturan hukum tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran